

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingkat kemiskinan di Indonesia tetap menjadi salah satu isu paling mendesak dan krusial yang memerlukan perhatian serius dan terencana dengan matang dalam kerangka strategi pembangunan sosial dan ekonomi nasional. Meskipun telah terjadi penurunan secara bertahap, Indonesia masih dihadapkan pada dua tantangan besar yaitu: 1) tingginya kesenjangan pendapatan antar individu maupun antar kelompok masyarakat; 2) disparitas pembangunan dan kesejahteraan antar wilayah. Kedua permasalahan tersebut memerlukan intervensi kebijakan pemerintah yang lebih terarah dan inklusif. Angka kemiskinan nasional di Indonesia menunjukkan adanya disparitas yang tajam antarwilayah (Tabel 1.1), di mana persentase kemiskinan masih terkonsentrasi sangat tinggi di beberapa provinsi, terutama di wilayah timur. Berdasarkan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 Papua Pegunungan menduduki peringkat teratas sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi mencapai 32,97%, diikuti oleh Papua Tengah (29,76%) dan Papua Barat (21,66%), menandakan tantangan struktural yang serius dalam mencapai pemerataan kesejahteraan di kepulauan tersebut.

Fenomena kemiskinan ini juga menunjukkan kontras menarik di Pulau Jawa yang merupakan pusat aktivitas ekonomi nasional. Provinsi DI Yogyakarta menempati urutan ke-17 di antara seluruh provinsi di Indonesia yang memiliki

tingkat persentase penduduk miskin tertinggi. Tercatat, tingkat persentase penduduk miskin sebesar 10,83% pada tahun 2024.

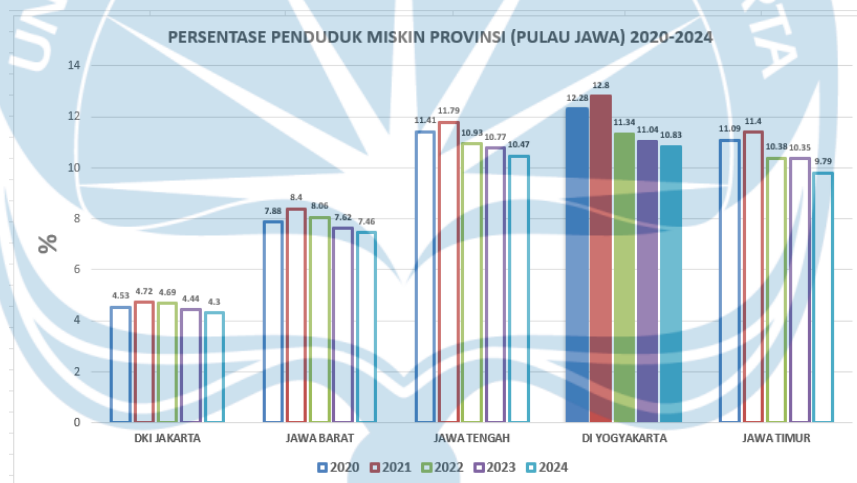
Tabel 1.1
Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi di Indonesia, 2024
(Ranking 1-38)

PROVINSI	%	RANK	PROVINSI	%	RANK
PAPUA PEGUNUNGAN	32.97	1	JAWA TIMUR	9.79	20
PAPUA TENGAH	29.76	2	SULAWESI SELATAN	8.06	21
PAPUA BARAT	21.66	3	SUMATERA UTARA	7.99	22
NUSA TENGGARA TIMUR	19.48	4	JAWA BARAT	7.46	23
PAPUA BARAT DAYA	18.13	5	SULAWESI UTARA	7.25	24
PAPUA SELATAN	17.44	6	JAMBI	7.1	25
PAPUA	17.26	7	RIAU	6.67	26
MALUKU	16.05	8	KALIMANTAN BARAT	6.32	27
GORONTALO	14.57	9	KALIMANTAN UTARA	6.32	27
ACEH	14.23	10	MALUKU UTARA	6.32	27
BENGKULU	13.56	11	SUMATERA BARAT	5.97	30
NUSA TENGGARA BARAT	12.91	12	BANTEN	5.84	31
SULAWESI TENGAH	11.77	13	KALIMANTAN TIMUR	5.78	32
SULAWESI TENGGARA	11.21	14	KEP. RIAU	5.37	33
SULAWESI BARAT	11.21	14	KALIMANTAN TENGAH	5.17	34
SUMATERA SELATAN	10.97	16	KEP. BANGKA BELITUNG	4.55	35
DI YOGYAKARTA	10.83	17	DKI JAKARTA	4.3	36
LAMPUNG	10.69	18	KALIMANTAN SELATAN	4.11	37
JAWA TENGAH	10.47	19	BALI	4	38

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Data kemiskinan di Pulau Jawa dari tahun 2020 hingga 2024 (Gambar 1.1) memperlihatkan adanya disparitas yang nyata dalam isu kesejahteraan di antara provinsi-provinsi utama Indonesia. Secara umum, DKI Jakarta konsisten mempertahankan tingkat kemiskinan terendah, berada di kisaran 4,3% hingga 4,72%, mencerminkan stabilitas ekonomi yang kuat di ibu kota. Sementara itu, provinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menghadapi tantangan persentase kemiskinan yang lebih tinggi, berkisar antara 7,46% hingga 11,4%, meskipun menunjukkan tren penurunan dari puncak-puncak yang terjadi di awal pandemi. Namun, dalam konteks perbandingan regional ini, posisi DI Yogyakarta menjadi fenomena yang paling menonjol dan memerlukan perhatian khusus.

Berdasarkan grafik, dapat dikonfirmasi bahwa DI Yogyakarta secara konsisten adalah provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di seluruh Pulau Jawa selama periode 2020 hingga 2024. Meskipun persentasenya menunjukkan penurunan dari puncaknya yang mencapai 12,8% pada tahun 2021, angka kemiskinan DI Yogyakarta tetap bertahan di angka 10,83% di tahun 2024, jauh melampaui seluruh provinsi di sekitarnya. Realitas ini menciptakan sebuah paradoks kemiskinan di Pulau Jawa, di mana DI Yogyakarta yang dikenal luas sebagai pusat kebudayaan, pariwisata, dan pendidikan tinggi justru memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di antara provinsi-provinsi di pulau yang sama.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2020-2024)

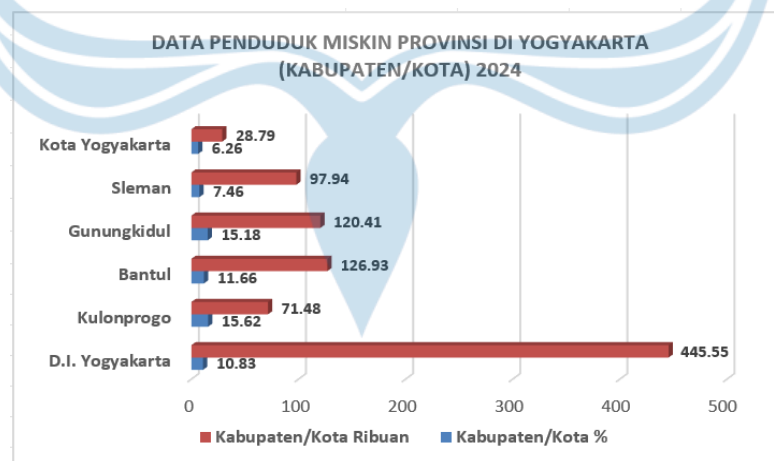
Gambar 1.1

Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi (Pulau Jawa), 2020-2024

Tingginya angka kemiskinan DI Yogyakarta secara keseluruhan (10,83% atau 445,55 ribu jiwa di tahun 2024) besar didorong oleh disparitas signifikan di tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan data kemiskinan DI Yogyakarta (Gambar 1.2), terlihat bahwa persentase kemiskinan tertinggi berpusat di wilayah pedesaan, yakni Kabupaten Gunungkidul dengan persentase mencapai 15,18% (120,41 ribu jiwa),

diikuti oleh Kulonprogo (15,62% atau 71,48 ribu jiwa) dan Bantul (11,66% atau 126,93 ribu jiwa). Di sisi lain, Kabupaten Sleman memiliki persentase kemiskinan yang lebih rendah yaitu 7,46% (97,94 ribu jiwa), menempatkannya di posisi kedua setelah Kota Yogyakarta yang mencatat persentase paling rendah yaitu 6,26% (28,79 ribu jiwa).

Dalam konteks ini, Kabupaten Sleman merupakan bagian penting dan mendasar dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menempati posisi geografis di bagian utara provinsi tersebut. Reputasi Sleman sangat kuat, di mana daerah ini dikenal sebagai lokasi yang amat penting secara strategis. Wilayah ini menyimpan potensi besar dalam hal, pariwisata alam dan situs-situs bersejarah, sekaligus menjadi penopang utama segala aktivitas dan kebutuhan Kota Yogyakarta. Namun demikian, di balik citranya sebagai daerah maju dan berpotensi tinggi, isu kemiskinan di Sleman tetap menjadi tantangan yang perlu dicermati serius.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Gambar 1.2
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi DI
Yogyakarta, 2024

Angka ini merepresentasikan jumlah penduduk miskin yang mencapai sekitar 97,94 ribu jiwa pada tahun 2024, sebuah jumlah yang menuntut intervensi kebijakan yang lebih terfokus dan berkelanjutan. Dengan besarnya populasi yang masih memerlukan dukungan untuk keluar dari jerat kemiskinan, kebutuhan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah ini menjadi semakin mendesak dan harus menjadi prioritas utama bagi seluruh pemangku kepentingan.

Berbagai upaya telah dilakukan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, untuk mengatasi isu ini, dan salah satu pendekatan yang diambil oleh pemerintah adalah melalui program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam mengelola sumber daya yang ada, memperbaiki pengetahuan, keterampilan, dan kualitas hidup mereka. Menurut Subekti et al., (2018), pemberdayaan merupakan kunci untuk mengatasi kemiskinan, karena dengan memberdayakan masyarakat, mereka dapat memiliki kesempatan lebih besar atas kehidupan mereka, serta meningkatkan taraf ekonomi dan sosial. Meskipun konsep ini telah menjadi bagian integral dari strategi pembangunan, pelaksanaannya di lapangan sering kali menghadapi tantangan, seperti kurangnya akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan sumber daya yang memadai. Meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya kemiskinan yang terus menerus bertambah dari hari kehari maka pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia mengeluarkan salah satu bentuk upaya penanggulangan melalui program pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) salah satunya dilakukan dengan membentuk program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Kelompok Usaha Bersama adalah program penanggulangan kemiskinan yang dilandasi suatu pertimbangan atas kenyataan adanya keterbatasan yang melekat pada penyandang masalah kesejahteraan sosial dan keluarga miskin, seperti rendahnya sumber daya manusia, kurangnya modal usaha dan keterbatasan kemampuan dalam menjalin jaringan pemasaran.

Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan peran Batik Saraswati dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan produksi batik sebagai upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sebagaimana telah diketahui secara luas, batik merupakan salah satu warisan budaya dunia yang telah diakui oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO). Batik Saraswati, yang berasal dari Desa. Wukiharjo Kec. Prambanan, Kabupaten Sleman, Kelompok pengrajin Batik Saraswati ini berdiri pada 1 November 2019. Batik Saraswati merupakan suatu usaha bersama yang dimulai dengan sembilan orang anggota. Meskipun sempat mengalami masa vakum pada tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19, kegiatan kelompok dilanjutkan kembali pada tahun 2021.



Sumber : Dokumentasi Peneliti (2025)

Gambar 1.3

Plakat Resmi Anggota Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Proses pengembangan keanggotaan terus berjalan hingga pada tahun 2023 kelompok Batik Saraswati resmi bergabung di bawah pendampingan program kelompok Usaha Bersama (KUBE) Lestari Budaya yang dibentuk oleh Dinas Sosial Kabupaten Sleman, hingga saat ini Batik Saraswati KUBE Lestari Budaya masih eksis dalam pengembangan produksi berbagai macam batik diantaranya seperti batik cap, tulis, *ecoprint*, dan abstrak. Serta untuk saat ini memiliki total anggota aktif sebanyak 11 orang. Melalui program pemberdayaan masyarakat di KUBE Lestari Budaya, diharapkan para pengrajin di kelompok batik Saraswati dapat diberdayakan untuk meningkatkan pendapatan dan mempromosikan produk batik mereka ke pasar yang lebih luas.

Program ini tidak hanya berfokus pada produksi batik, tetapi juga mencakup aspek peningkatan keterampilan dan pengetahuan pengrajin. Dengan adanya pelatihan dan pendampingan, para penerima manfaat diharapkan dapat mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam produksi batik, sehingga mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Tingkat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat melalui Batik Saraswati binaan Dinas Sosial Kabupaten Sleman dapat dikategorikan berada pada tingkat berkembang, mengacu pada kerangka evaluasi KUBE yang dikembangkan oleh Melianti, Yamani, dan Berkat (2022) yang membagi capaian program kedalam empat kategori, yaitu gagal, tumbuh, berkembang, dan maju. Kategori ini didasarkan pada terpenuhinya seluruh indikator keberhasilan dari tiga aspek utama evaluasi program secara memadai. Pada aspek ekonomi, kelompok telah mampu menghasilkan pendapatan rutin,

memenuhi pesanan berskala institusional, serta menerima dukungan Dana Keistimewaan secara bertahap hingga total Rp63.000.000 sebagai bukti kepercayaan pemerintah daerah terhadap perkembangan usaha kelompok. Pada aspek kelembagaan, struktur organisasi kelompok berjalan dengan baik, keanggotaan tumbuh, dan kelompok telah resmi terdaftar di bawah pendampingan Dinas Sosial sejak tahun 2023. Pada aspek sosial, solidaritas antar anggota terjalin erat, semangat pelestarian budaya batik terjaga, dan kelompok aktif berpartisipasi dalam berbagai pameran seni dan kebudayaan tingkat regional.

Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan dalam strategi pemasaran dan kesulitan dalam mengadopsi teknologi baru, yang sering kali menjadi penghambat bagi pengrajin, terutama yang sudah berusia lanjut. Dengan demikian, meskipun program ini belum mencapai kategori maju yang menyaratkan kemandirian penuh dan penguasaan pasar yang luas, capaian pada level berkembang ini telah membuktikan bahwa program pemberdayaan melalui Batik Saraswati telah mampu memberikan dampak yang nyata dan terukur dalam mendorong peningkatan perekonomian serta mengurangi tekanan kemiskinan yang dialami oleh masyarakat penerima manfaat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai proses pemberdayaan masyarakat melalui produksi batik Saraswati, serta mengeksplorasi pencapaian yang telah diraih dan faktor-faktor yang mendukung atau menghambat proses tersebut. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah tahapan yang dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui produksi batik Saraswati di KUBE Lestari Budaya dalam mengatasi kemiskinan?
- 2) Apa saja faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui batik Saraswati KUBE Lestari Budaya?
- 3) Apa saja hambatan yang dihadapi dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui batik Saraswati KUBE Lestari Budaya?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui produksi batik Saraswati di KUBE Lestari Budaya dalam mengatasi kemiskinan.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE Lestari Budaya.
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE Lestari Budaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

- 1) Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan saat merumuskan atau mengevaluasi strategi penanggulangan kemiskinan di pedesaan. Hasilnya juga akan membantu pemerintah mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
- 2) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya kajian pemberdayaan masyarakat melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dalam mengatasi kemiskinan di pedesaan, serta juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain yang tertarik pada pembangunan sosial dan ekonomi berbasis pemberdayaan. Temuan hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, sehingga dapat meningkatkan relevansi kurikulum dengan realitas sosial di masyarakat.
- 3) Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran dan referensi bagi seluruh kelompok usaha bersama. Dengan menganalisis faktor pendukung dan hambatan pada KUBE, masyarakat dapat mengadaptasi strategi terbaik untuk membentuk atau mengembangkan inisiatif usaha bersama lainnya. Manfaat utamanya adalah mendukung upaya kolektif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi lokal dan memperkuat kapasitas usaha masyarakat, yang pada akhirnya memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah pedesaan.